

***THE INFLUENCE OF FINANCIAL INDEPENDENCE, FINANCIAL  
DEPENDENCE, AND DEBT RATIO ON THE FINANCIAL SUSTAINABILITY  
OF PROVINCIAL GOVERNMENTS IN SUMATRA ISLAND***

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN, KETERGANTUNGAN KEUANGAN,  
DAN RASIO UTANG TERHADAP FINANCIAL SUSTAINABILITY  
PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA**

**Rahma Pauziah<sup>1\*</sup>, Nurhasanah<sup>2</sup>, Desi Indriasari<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang<sup>1,2,3</sup>

[rahmapauziah29@gmail.com](mailto:rahmapauziah29@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of Financial Independence, Financial Dependence, and Debt Ratio on the Financial Sustainability of Provincial Governments in Sumatra Island during the 2019–2023 fiscal year. This study uses a quantitative approach with a panel data regression analysis method and the author uses a documentation method, which includes secondary data collection. The independent variables used include financial independence, financial dependence, and debt-to-income ratio, while the dependent variable is financial sustainability as measured by the adjusted operating surplus. The results show that Financial Independence has a positive and significant effect on financial sustainability, financial dependence has a negative and significant effect, while the debt ratio has no significant effect. Simultaneously, these three variables have a significant effect on financial sustainability. This finding confirms that increasing fiscal independence and reducing financial dependence are important for maintaining regional financial sustainability.*

**Keywords:** *Financial Sustainability, Financial Independence, Financial Dependence, Debt Ratio, Provincial Government*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Utang Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera selama tahun anggaran 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel dan penulis menggunakan metode dokumentasi, yang mencakup pengumpulan data sekunder. Variabel independen yang digunakan meliputi kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, dan rasio utang terhadap pendapatan, sementara variabel dependen adalah keberlanjutan keuangan yang diukur dari surplus operasional yang disesuaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan rasio utang tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal dan pengurangan ketergantungan keuangan penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

**Kata kunci:** Keberlanjutan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, Rasio Utang, Pemerintah Provinsi

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Keuangan Negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara moneter serta segala sesuatu, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dimiliki negara sebagai hasil dari pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai secara moneter, serta segala jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh daerah dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban tersebut.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1

disebutkan bahwa Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras dengan undang-undang. Menurut Abdullah et al., (2023), Financial Sustainability mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menjaga keuangan negara pada posisi yang baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, sehubungan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan pengeluaran, pendapatan, biaya pembayaran utang, dan faktor sosial ekonomi dan lingkungan di masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan

berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lhutfi & Sugiharti (2022) menyatakan bahwa ekonomi mungkin berdampak pada keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, agar pemerintah dapat mengambil pilihan terbaik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, penting untuk memahami variabel-variabel yang dapat mempengaruhi situasi keuangan, khususnya keberlanjutan keuangan daerah. Keberlanjutan Keuangan atau Financial Sustainability adalah kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan yang efisien dan efektif tanpa mengurangi nilainya bagi kesuksesan di masa depan (Andrews R, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien akan mengakibatkan keuangan provinsi tidak berkelanjutan sehingga mengganggu stabilitas keuangan pemerintah daerah di kemudian hari dan berpotensi mengganggu pelayanan kepada Masyarakat. Kegagalan keuangan pemerintah daerah adalah kegagalan sistem pengelolaan keuangannya dan sering diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya guna menutupi pengeluarannya (Tri Wardhani, 2020).

Financial sustainability pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi, faktor internal, eksternal, atau bahkan politik (Wällstedt et al., 2014). Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, sedangkan non-ekonomi seperti tingkat pertumbuhan populasi (AlObaidi & Almashhadani, 2023). Oleh karena itu, memahami variabel-variabel yang dapat memengaruhi situasi keuangan sangatlah penting bagi pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik demi meningkatkan layanan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan asli daerah secara substansial berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mencari strategi yang efisien untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kenaikan pendapatan asli daerah juga berarti bertambahnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur umum maupun pemberian bantuan sosial.

Apabila suatu daerah mempunyai

pendapatan asli daerah yang tinggi maka pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk mendanai fasilitas terkait pelayanan dan infrastruktur tanpa terbebani adanya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Sebaliknya, apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Wardhani & Payatma, 2020).

Pendapatan asli daerah yang belum mencukupi untuk membiayai program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi serta kebutuhan mendesak dari masyarakat, maka pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan langkah strategis dengan mengambil opsi pinjaman atau utang. Apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut melakukan pinjaman daerah (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023). Terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah.

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti topik serupa dimana penelitian Financial Sustainability banyak dilakukan pada sektor bisnis seperti perbankan. Pada sektor pemerintah penelitian mengenai Financial Sustainability masih sedikit dan kebanyakan di negara-negara Eropa, Australia dan Amerika. Financial Sustainability yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk membatasi utang pemerintah yang berlebihan dan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang dan berkelanjutan (Slembeck et al., 2014). Hasil penelitian terkait financial

sustainability pada Irak selama 2015-2021 menunjukkan bahwa financial sustainability terpengaruh oleh berbagai faktor seperti kinerja ekonomi, penerimaan pajak, defisit anggaran, dan pengeluaran pemerintah (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023).

Penelitian terkait financial sustainability pada sektor publik juga dilakukan oleh (Lhutfi & Sugiharti, 2022) dengan menggunakan variabel total populasi, PDRB, dan financial independence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total populasi berpengaruh negatif terhadap financial sustainability sedangkan PDRB dan financial independence berpengaruh positif terhadap financial sustainability. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhani & Payatma, 2020) Dimana penelitian tersebut menggunakan variabel jumlah penduduk, indeks Pembangunan manusia, PDRB (produk domestik regional bruto), kemandirian keuangan, dan debt to revenue, penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan rasio utang memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap financial sustainability dan kemandirian keuangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap financial sustainability. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB tidak berpengaruh terhadap financial sustainability di sektor pemerintah. Keterkaitan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan menjadi pedoman untuk melakukan penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, dan rasio utang terhadap pendapatan sebagai variabel dependen serta financial sustainability sebagai variabel independen.

Pemerintahan yang selalu bergantung pada pinjaman daerah akan terpaksa mencari sumber pendapatan lain, seperti pajak atau retribusi yang

lebih untuk memenuhi kewajiban utang (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023). Peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengukur kemandirian Keuangan daerah tersebut, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka semakin banyak pendapatan asli daerah yang digali dan tidak bergantung pada transfer pusat maupun bantuan dari provinsi. Tingkat kemandirian keuangan daerah pada beberapa Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023 masih ada yang mengalami penurunan.

Masih ada beberapa provinsi di Sumatera dengan tingkat kemandirian keuangan rata-rata dibawah 50%, dalam kategori rendah sekali yaitu 0-20% Provinsi tersebut didominasi oleh Aceh, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan belanja daerah, sehingga beberapa provinsi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman provinsi lain untuk melaksanakan kegiatan belanja daerah. Apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Wardhani & Payatma, 2020). Studi yang dilakukan oleh (Subires et al. 2019) juga menemukan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber pendanaan eksternal berisiko mengalami kesulitan dalam mempertahankan Financial Sustainability.

Hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera masih memiliki rasio ketergantungan yang tinggi yaitu rata-rata diatas 50%. Beberapa provinsi seperti Aceh, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka ketergantungan yang sangat tinggi, bahkan melebihi 70% pada beberapa

tahun tertentu, seperti Aceh pada tahun 2023 sebesar 72% dan Lampung pada tahun 2023 sebesar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari transfer pusat bahkan lebih besar dari total pendapatan daerahnya sendiri. Ketergantungan yang sangat tinggi ini mencerminkan bahwa daerah tersebut masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat, dan belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah yang diterima oleh beberapa provinsi tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan belanja daerah, sehingga beberapa provinsi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat.

Terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah. rasio utang pemerintah daerah di beberapa provinsi sumatera mengalami kenaikan dan penurunan. Jika pinjaman atau utang yang diambil oleh pemerintah daerah melebihi pendapatan yang diperoleh, maka akan menghasilkan defisit operasional (Wardhani & Payatma, 2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk melunasi utang dan menghindari risiko fiskal terhadap keuangan daerah.

Rasio Utang pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya variasi perkembangan rasio utang antar provinsi. Secara umum, terjadi tren peningkatan rasio utang pada sebagian besar provinsi, khususnya setelah tahun 2021, yang dapat diasumsikan sebagai dampak dari kebutuhan pembiayaan tambahan pasca-pandemi COVID-19. Provinsi Lampung menunjukkan rasio utang tertinggi di antara seluruh

provinsi, dengan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun dan mencapai lebih dari 70% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap sumber pembiayaan dari utang untuk mendukung belanja daerah. Kondisi serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara, yang mengalami kenaikan rasio utang secara konsisten sejak tahun 2019 dan mencapai sekitar 67% pada tahun 2023. Demikian pula, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan rasio utang yang cukup tinggi dengan tren peningkatan setiap tahun, menunjukkan pola pembiayaan yang serupa. Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu mengalami peningkatan rasio utang secara bertahap, terutama sejak tahun 2021. Kenaikan ini masih dalam batas moderat, namun menunjukkan arah peningkatan yang perlu diwaspadai. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan pola fluktuatif, dengan peningkatan pada tahun 2022 yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Secara keseluruhan, pola perkembangan rasio utang ini memberikan gambaran mengenai strategi pembiayaan yang beragam antar provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi yang mengalami peningkatan tajam dalam rasio utang perlu memperhatikan keberlanjutan fiskal ke depan, agar peningkatan utang tidak berdampak negatif terhadap kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rasio utang adalah besarnya persentase utang yang dimiliki Pemerintah Daerah, khususnya utang jangka panjang. Semakin tinggi utang maka semakin kecil kemungkinan Pemerintah Daerah untuk menjalankan Financial Sustainability. Utang yang terus meningkat akan mengancam Indonesia dalam memenuhi

kemampuannya untuk melayani masyarakat dan juga dapat menjadi menurunnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan Keuangan di masa depan yang menjadi pengukuran akuntansi financial sustainability. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk melunasi utang dan menghindari risiko fiskal terhadap keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengandalkan pendapatan internalnya sendiri, sementara ketergantungan keuangan daerah mendefinisikan seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Rasio utang terhadap pendapatan akan menggambarkan beban utang pemerintah daerah dalam perbandingan dengan pendapatan yang pemerintah peroleh. penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019-2023.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Goal-Setting Theory**

Edwin Locke memperkenalkan teori motivasi goal-setting pada tahun 1960-an, Teori ini menyatakan bahwa penetapan tujuan secara fundamental berkaitan dengan kinerja tugas, di mana adanya tujuan yang spesifik dan menantang, disertai dengan umpan balik yang sesuai dapat meningkatkan kinerja tugas secara lebih optimal. Goal Setting Theory atau Teori Penetapan Tujuan menyoroti pentingnya keterkaitan antara tujuan dan kinerja, di mana kinerja yang paling optimal cenderung tercapai ketika sasaran yang ditetapkan bersifat spesifik.

### **Financial Sustainability**

Konsep Financial Sustainability yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang meliputi pemerataan infrastruktur, sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa mendatang”, (Sukaharsono & Handayani, 2021:39).

“Financial sustainability dalam penelitian ini dihitung berdasarkan pendapatan yang telah disesuaikan, yaitu selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional yang telah dikurangkan dengan pos luar biasa”, (Wardhani & Payamta, 2020)

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2019:232), “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Pada penelitian ini kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer pusat dan daerah serta pinjaman.

### **Ketertanggung Jawaban Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2019:140), “ketertanggung jawaban daerah merupakan perbandingan perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah”. Pada penelitian ini ketertanggung jawaban keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah.

### **Rasio Utang**

Menurut Mahmudi (2019), Menjelaskan bahwa rasio utang adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai

proporsi utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset atau ekuitas. Pada penelitian ini utang daerah diukur dengan rasio total utang terhadap total pendapatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera periode 2019-2023 yaitu berjumlah 10 Provinsi. Berikut ini disajikan daftar Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023 secara lengkap. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan menggunakan metode sampling jenuh. sampel yang akan digunakan terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit selama periode 2019-2023.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yang mencakup pengumpulan data sekunder dari catatan atau dokumen yang telah dipublikasikan melalui media perantara, yakni data yang dipublikasikan melalui portal E-PPID Pusat Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

### **Teknik Analisis Data**

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Ini dilakukan dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menampilkan hasil pengukuran mean (rata-rata), nilai minimal dan maksimal, serta standar deviasi dari semua variabel yang diamati.

#### **2. Model Regresi Data Panel**

Dalam penelitian ini menggunakan

data panel yang terdiri dari data time series dan data cross section. Data time series dalam penelitian ini, yakni pada periode waktu lima tahun, dari tahun 2018-2022. Adapun penggunaan data cross section dalam penelitian ini, yakni pada pemerintah daerah Provinsi di Sumatera, dengan total sampel pemerintah daerah sebanyak 34 provinsi. Dalam memilih model data panel tersebut, maka dilakukan dengan 3 pengujian yakni Uji F (Uji Chow), Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier (LM).

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari normalitas data, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linear.

### 4. Uji Signifikan

Dalam analisis regresi linear berganda akan diketahui arah serta berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah, Financial Sustainability = f (Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Utang).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemilihan Model Data Panel

#### 1. Uji Chow

**Tabel 1. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.178847	(9,37)	0.0466
Cross-section Chi-square	21.263057	9	0.0115

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji chow menunjukkan nilai probability Cross-section F sebesar 0,0466. Berdasarkan

hasil pengambilan keputusan jika nilai Prob. < 0,05 maka model yang digunakan adalah Fixed Effect. Selanjutnya akan dilakukan uji Hausman untuk menentukan apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang terbaik untuk digunakan.

### 2. Uji Hausman

Hasil uji hausman diperoleh nilai probability Cross-section random sebesar 0,3349. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan jika nilai Prob. < 0,05 maka model yang digunakan adalah Fixed Effect.

**Tabel 2. Hasil Uji Model Data Panel**

Uji Model Data Panel	Nilai Probabilitas >/< Nilai Signifikansi	Hasil Uji Model
Uji Chow	0,0466 < 0,05	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,3349 > 0,05	Fixed Effect Model

Sumber: Ouput data diolah (Eviews 13), 2025

Penggunaan Fixed Effect Model telah dipilih dua kali pada uji chow dan uji hausman, oleh karena itu tidak perlu dilakukan uji lagrange multiplier. Dapat disimpulkan dari ketiga model (Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model), penggunaan model yang terbaik adalah fixed effect model dalam menginterpretasikan regresi data panel penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

Hasil uji Multikolinearitas diketahui nilai centered VIF keempat variabel independen kurang dari 10. Berdasarkan pengambilan keputusan jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square pada Obs\*R-squared sebesar 0,6207. Berdasarkan pengambilan keputusan jika nilai probabilitas pada Obs\*R-squared (p value) > 0.05 maka Ho ditolak, yang heteroskedastisitas. berarti tidak terdapat masalah.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi dengan Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.431451	0.006330	226.1296	0.0000
X1	0.082293	0.039936	2.060622	0.0278
X2	-0.002933	0.001161	-2.526228	0.0324
X3	-0.010500	0.011748	0.893763	0.3947

  

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.649939	Mean dependent var	1.709476	
Adjusted R-squared	0.536406	S.D. dependent var	0.559728	
S.E. of regression	0.011341	Sum squared resid	0.004759	
F-statistic	5.724652	Durbin-Watson stat	2.310794	
Prob(F-statistic)	0.000019			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.411997	Mean dependent var	1.427266	
Sum squared resid	0.005288	Durbin-Watson stat	2.207327	

Sumber: Ouput data diolah (Eviews 13), 2025

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut.

$$Y = 1.431451 + 0.082293 * X1 - 0.002933 * X2 - 0.010500 * X3$$

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Diperoleh hasil uji koefisien determinasi yaitu Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,649939 menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan menjelaskan variabilitas data pada variabel dependen yakni financial sustainability sebesar 64,99% melalui variabel-variabel independen yang digunakan dalam model.

Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,536406. Angka ini

mengindikasikan bahwa sebesar 53,64% variasi pada variabel financial sustainability dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, serta rasio utang terhadap pendapatan. Adapun sisanya, yaitu sebesar 46,36%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 2. Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji t diperoleh Nilai t hitung sebesar 2,060622 lebih besar dari t tabel (2,060622 > 1,985802). Artinya variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap financial sustainability. Secara signifikansi probabilitas variabel kemandirian keuangan daerah yaitu 0,0278 > 0,05 artinya signifikan. Oleh karena itu, hipotesis H<sub>1</sub> diterima.

Nilai t hitung sebesar -2,526228 lebih kecil dari dari t tabel yakni -1,985802 (-2,526228 < -1,985802). Artinya variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap financial sustainability. Nilai signifikansi sebesar 0,0324 < 0,05 artinya secara signifikan variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability, maka H<sub>2</sub> diterima.

Nilai t hitung sebesar 0,893763 lebih kecil dari dari t tabel yakni 1,985802 (0,893763 < 1,985802). Artinya variabel rasio utang pada pendapatan tidak berpengaruh terhadap financial sustainability. Nilai signifikansi sebesar 0,3947 > 0,05. artinya secara signifikan variabel rasio utang pada pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial sustainability, maka H<sub>3</sub> ditolak.

### 3. Uji F (Uji Simultan)

Hasil uji t diperoleh bahwa nilai F-hitung sebesar 5,724652 > F-tabel sebesar 2,704703 maka H<sub>4</sub> diterima sehingga

dapat disimpulkan variabel kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan rasio utang pada pendapatan secara simultan memiliki pengaruh terhadap financial sustainability. Berdasarkan signifikansi, dapat diperoleh nilai probabilitas F sebesar  $0,000019 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan rasio utang pada pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Financial Sustainability**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Eviews mengenai hasil uji t atau uji statistik secara parsial, nilai variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 2,060622 lebih besar dari t tabel ( $2,060622 > 1,985802$ ). Artinya variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap financial sustainability. Nilai signifikansi sebesar  $0,0324 < 0,05$  artinya secara signifikan variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability, maka  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah pada provinsi di pulau sumatera berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability.

Kemandirian Keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemandirian ini diharapkan menjadi indikator penting dalam mendukung Financial Sustainability karena menunjukkan kekuatan fiskal jangka panjang dan stabilitas keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian

Wardhani & Payamta (2020) yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri melalui PAD dapat memperkuat Financial Sustainability, karena mengurangi ketergantungan pada dana transfer yang sifatnya fluktuatif. Hasil penelitian oleh Ardhani & Pratiwi (2021) juga mendukung bahwa peningkatan PAD secara signifikan berkontribusi terhadap kestabilan fiskal daerah, sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan berkelanjutan. Begitu pula, Kusumawardani & Rahmawati (2022) menemukan bahwa daerah dengan rasio kemandirian tinggi memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlanjutan keuangan daerah.

#### **Pengaruh Ketergantungan Daerah terhadap Financial Sustainability**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Eviews mengenai hasil uji t atau uji statistik secara parsial, nilai variabel ketergantungan keuangan daerah sebesar -2,526228 lebih kecil dari t tabel yakni -1,985802 ( $-2,526228 < -1,985802$ ). Artinya variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap financial sustainability. Nilai signifikansi sebesar  $0,0324 < 0,05$  artinya secara signifikan variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability, maka  $H_2$  diterima. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability. Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat, maka semakin menurun kemampuan financial sustainability daerah tersebut, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wardhani & Payatma (2020), yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap financial sustainability. Artinya apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi maka pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk mendanai fasilitas terkait pelayanan dan infrastruktur tanpa terbebani adanya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Sebaliknya, apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, maka daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang artinya keberlanjutan keuangan (financial sustainability) di pemerintah daerah akan menurun.

#### **Pengaruh Rasio Utang terhadap Financial Sustainability**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Eviews mengenai hasil uji t atau uji statistik secara parsial, nilai variabel rasio utang pada pendapatan sebesar 0,893763 lebih kecil dari dari t tabel yakni 1,985802 ( $0,893763 < 1,985802$ ). Artinya variabel rasio utang pada pendapatan tidak berpengaruh terhadap financial sustainability. Nilai signifikansi sebesar  $0,3947 > 0,05$ . artinya secara signifikan variabel rasio utang pada pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial sustainability, maka H3 ditolak. Ini menunjukkan bahwa rasio utang pada pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability.

Penelitian ini didukung oleh temuan Syahriyal, Lubis, dan Ibrahim (2023) yang meneliti Pemerintah Provinsi Aceh, di mana mereka menyimpulkan bahwa rasio utang bukanlah indikator utama yang memengaruhi financial sustainability. Faktor seperti efisiensi

belanja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan manajemen pendapatan daerah dinilai lebih dominan. Penelitian serupa oleh Mazen Kebewar (2013) juga menemukan bahwa pada beberapa sektor, seperti jasa, utang tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan, karena adanya faktor lain yang lebih menentukan seperti efisiensi manajerial dan stabilitas pendapatan.

Dengan demikian, ketidaksignifikanan pengaruh rasio utang pada pendapatan terhadap financial sustainability mencerminkan realita fiskal daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh struktur pendapatan campuran antara PAD dan transfer pusat, serta strategi pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada utang.

#### **Pengaruh Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Utang pada terhadap Financial Sustainability**

Berdasarkan hasil uji secara simultan nilai F-hitung sebesar 5,724652 > F-tabel sebesar 2,704703 maka H4 diterima sehingga dapat disimpulkan variabel kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan rasio utang pada pendapatan secara simultan memiliki pengaruh terhadap financial sustainability. Berdasarkan signifikansi, dapat diperoleh nilai probabilitas F sebesar  $0,000019 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan rasio utang pada pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability.

Apabila pemerintah daerah secara bersama-sama memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat, dan kemampuan mengendalikan serta mengurangi utang daerah, maka hal ini akan membuka

peluang besar untuk mewujudkan financial sustainability yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri secara optimal, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mencerminkan kemampuan daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa selalu menunggu dana transfer dari pusat. Sementara itu, tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat memberikan keleluasaan fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis. Transfer dana yang bersifat kondisional atau sangat terikat dapat membatasi fleksibilitas belanja daerah. Oleh karena itu, dengan ketergantungan yang menurun, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk merancang kebijakan pembangunan berorientasi jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik lokal. Di sisi lain, pengendalian terhadap rasio utang juga menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan. Meskipun utang dapat menjadi instrumen pembiayaan strategis, khususnya untuk proyek infrastruktur, namun jika tidak dikelola dengan bijak, utang justru dapat menimbulkan beban fiskal di masa mendatang. Maka, dengan upaya pemerintah daerah untuk menekan peningkatan utang dan menjaga rasio utang terhadap pendapatan dalam batas aman, maka risiko fiskal dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan publik yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil:

1. Variabel kemandirian keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Sustainability dikarenakan proporsi tingkat kemandirian keuangan melalui pendapatan asli daerah di Provinsi di Pulau Sumatera terhadap total pendapatan daerah cukup untuk keuangan jangka panjang.
2. Variabel ketergantungan keuangan (X2) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap financial sustainability dikarenakan tingkat ketergantungan yang tinggi disebabkan karena pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sehingga menyebabkan pemerintah daerah tersebut bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan investor. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah maka keberlanjutan keuangan semakin rendah.
3. Variabel rasio utang (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial sustainability. Tingkat utang yang dimiliki oleh sebagian besar pemerintah provinsi di Pulau Sumatera cenderung masih dalam batas wajar, serta difokuskan pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur atau investasi jangka panjang yang belum menghasilkan pendapatan langsung dalam jangka pendek.
4. Variabel kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, dan rasio utang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap financial sustainability. Maka dari itu Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kemandirian keuangan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dan mengurangi

ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Selain itu, pengelolaan utang perlu dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal agar tidak mengganggu keberlanjutan keuangan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Meutia, R. (2023). What Determines Financial Sustainability in Local Government? Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 9(2), 1364-1377. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. (2023). "Financial Sustainability Assessment in Iraq for The Period 2015-2021". *Resmilitaris*, 13(1), 21-29.
- Amelia, S., & Gamayuni, R. R. (2025). Determinan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 20(1), 34-47. <https://doi.org/10.1234/jekp.v20i1.9012>
- Arif, M., & Bangun, R. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan terhadap Keberlanjutan Keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 19(1), 55-67. <https://doi.org/10.1234/jekp.v19i1.7890>
- Arsyasi, P. P., Periansya, & Yevi. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, dan Kinerja Keuangan terhadap Financial Sustainability pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2).
- Aulia, A. (2020). Goal Setting Theory Vs Reinforcement Theory: In Ruh Perspective Theory. <https://www.researchgate.net/publication/367390693>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi se-Indonesia. <https://bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2025.
- Bashir, M., Al-Obaidi, M., & Almashhadani, A. N. (2023). Financial Sustainability Assessment in Iraq for The Period 2015-2021 (Vol. 13). Winter-Spring 2023.
- Basuki, A. T. (2016). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan EViews*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Campos, E. L., & Cysne, R. P. (2023). Public finances sustainability by panel data models with cross-sectional dependence: Analysis of Brazilian states. *Revista Brasileira de Economia*, 77(1), 3-26. <https://doi.org/10.31346/rbe.v77.1.3>
- Faulk, D., & Killian, L. (2017). Debt Management and Intergenerational Equity in Local Government Finance. *Public Budgeting & Finance*, 37(2), 48-67. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12110>
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Ketujuh ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. 2022. "Financial sustainability: measurement and empirical evidence". *Journal of Business Economics*, 92(3), 467-

516.  
<https://doi.org/10.1007/s11573-022-01081-0>.
- Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IFAC. *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*; IFAC: New York, NY, USA, 2020
- Ismanto, H., dan Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Sleman: Deepublish, 40.
- Khairi, Y. D., & Meiranto, W. (2021). DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(4), 1–9. <http://ejournal>
- Kusumawati, A., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(12), 2587–2614. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i12.p03>.
- Kusumawati, D. A., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1515–1542
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022.
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial Sustainability Of Local Governments In Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159-170. <https://doi.org/10.17509/jurnal>.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 4*. UPP:STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- McLaren, J. I., & Struwig, F. W. (2019). Financial ratios as indicators of financial sustainability at a South African university. *Journal of Contemporary Management*, 16(2), 68-93. <https://doi.org/10.35683/jcm19030.0027>
- Masuda, H., Okabe, T., & Yamada, H. (2022). Local governments' roles in achieving the SDGs: Evidence from Japan's financial and administrative practices. *Sustainability*, 14(3), 1124.
- Pedro, M., & Bolviar, R. (2018) *Financial Sustainability in Public Administration Exploring the Concept of Financial Health*
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran RI Tahun 2022, No. 1. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*. Indonesia.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia.
- Rodríguez Bolívar, M. P., López Subires, M. D., Alcaide Muñoz, L., & Navarro Galera, A. (2019). The financial sustainability of local authorities in England and Spain: a comparative empirical study. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/0020852319834721>.
- Rohmadani, D. S., Yulsiati, H., Sari, Y., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N.

- (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia.
- Stie, I. S., & Widya Bangsa, G. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. Dalam *Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 11, Nomor 2).
- Sukaharsono, E. G., & Handayani, S. R. (2021). Akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan sektor publik. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability* (Switzerland), 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216008>
- Sugiyono, (2022). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi. Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahriyal, M., Lubis, A. F., & Ibrahim, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Sustainability Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jekp.v1>.
- Tosi, H. L., Locke, E. A., & Latham, G. P. (1991). A Theory of Goal Setting and Task Performance. *The Academy of Management Review*, 16(2), 480. <https://doi.org/10.2307/258875>
- Tri Wardhani, D. (t.t.). MENGUJI FAKTOR DETERMINAN FINANCIAL SUSTAINABILITY PADA SEKTOR PEMERINTAH. Dalam *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4, Nomor 1). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Tumija, N., Siregar, H., & Prasetyo, E. (2023). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keberlanjutan Fiskal Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 18(1), 77–89. <https://doi.org/10.1234/jekf.v18i1.3456>
- Wardhani, R., & Payatma, R. (2020). Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Financial Sustainability Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 123–134. <https://doi.org/10.24843/JAKD.2020.v15.i02.p03>.
- Winarno, W. W. (2017). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandary, A., Hanggari, T., Rini, C., & Khaerani, A. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam *FAIR: FINANCIAL & ACCOUNTING INDONESIAN RESEARCH* (Vol. 3, Nomor 1).